

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Ali, Zainuddin. Metode Penelitian Hukum. Jakarta: PT Bumi Aksara, 2022.

Giyono, Urip. Pembaharuan Hukum Ketenagakerjaan di Indonesia: Penetapan Upah Minimum Regional Berbasis Keadilan Pancasila. Depok: PT RajaGrafindo Persada, 2021.

Iskandar, A. Muhaimin. Negara dan Politik Kesejahteraan: Reorientasi Arah Baru Pembangunan. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2021.

Rahayu, Devi. Buku Ajar Hukum Ketenagakerjaan. Surabaya: Scopindo Media Pustaka, 2021.

Suhartini, Endeh, dkk. Hukum Ketenagakerjaan dan Kebijakan Upah. Depok: PT RajaGrafindo Persada, 2020.

Suhartini, Endeh, dkk. Politik Hukum Sistem Pengupahan. Depok: PT Rajawali Buana Pusaka, 2022.

Suteki & Taufani, Galang. Metodologi Penelitian Hukum: Filsafat, Teori dan Praktik. Depok: Rajawali Pers, 2018.

Jurnal/Artikel Ilmiah

Izzaty, Rafika Sari, “Kebijakan Penetapan Upah Minimum di Indonesia” *Jurnal Ekonomi & Kebijakan Publik* 4, No. 2, (2018).

Sonhaji, dkk, “Faktor-faktor yang Mempengaruhi Besaran Upah Minimum di Jawa Tengah Melalui Suatu Analisis Komparasi (Studi Kasus Kota Semarang dan Kabupaten Demak)” *Diponegoro Law Journal* 5, No. 3, (2016).

Ani Purwanti, dkk, “Optimalisasi Organisasi Kemasyarakatan dalam Menanggulangi Kemiskinan (Studi di Dusun Tanon Desa Ngrawan Kecamatan Getasan Kabupaten Semarang)” *Diponegoro Law Journal* 6, No. 1, (2017).

Syarifa Mahila, “Kebutuhan Hidup Layak dan Pengaruhnya Terhadap Penetapan Upah Minimum Provinsi Ditinjau dari Hukum Ketenagakerjaan” *Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi* 14, No. 2, (2017).

Susilo Andi Darma, “Kedudukan Hubungan Kerja: Berdasarkan Sudut Pandang Ilmu Kaidah Hukum Ketenagakerjaan dan Sifat Hukum Publik dan Privat” *Mimbar Hukum* 29, No. 2, (2017).

Vahdist, Riski, dan Mahfudz, “Pengaruh Gaji, Tunjangan, dan Promosi Jabatan Terhadap Kinerja Pegawai (Studi pada Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Tengah)” *Diponegoro Journal of Management* 6, No. 1, (2017).

Thamrin S, “Peranan Dewan Pengupahan Terhadap Penetapan Upah Minimum” *UIR Law Review* 1, No. 1, (2017).

Nanang Setyono, “Rekonstruksi Kebutuhan Hidup Layak (KHL) Melalui Koperasi Karyawan Dalam Kajian Undang-Undang No.13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan” *Jurnal Ius Constituendum* 3, No. 2, (2018).

Winda Feriyana, “Peran Dewan Pengupahan Dalam Rangka Penentuan Upah Minimum Kabupaten (UMK) Dan Upah Minimum Sektoral Kabupaten (UMSK) Di Kabupaten Oku Timur” *Jurnal Media Wahana Ekonomika* 14, No. 4, (2018).

Arrista Trimaya, “Pemberlakuan Upah Minimum Dalam Sistem Pengupahan Nasional Untuk Meningkatkan Kesejahteraan Tenaga Kerja” *Jurnal Aspirasi* 5, No. 1, (2018).

Kadek Agus, Putu Ade, “Implikasi Hukum Pengaturan Upah Minimum Sektoral Kabupaten Badung terhadap Pelaku Usaha pada Sektor Kepariwisata di Kabupaten Badung Provinsi Bali” *Supremasi Hukum: Jurnal Penelitian Hukum* 28, No. 1, (2019).

Ujang Charda S, “Model Kebijakan Pemerintahan Indonesia Dalam Sistem Pengupahan” *Jurnal Wawasan Hukum* 34, No. 1, (2019).

Rahmadinar, Ferizone, “Tinjauan Yuridis Terhadap Upah Minimum Sektoral (UMS) Kota Batam” *PETITA* 1, No. 2, (2019).

Lidia Afrilia, “Cacat Prosedur Penetapan Upah Minimum Sektoral Kabupaten/Kota (UMSK) Gresik Jawa Timur 2019” *Media Iuris* 2, No. 3, (2019).

Henny Damaryanti, dkk, “Pemenuhan Upah Minimum Sebagai Upaya Perlindungan Hak Konstitusional” *Jurnal Hukum Media Bhakti* 1, No. 2, (2017).

- Kornelius Benuf, Muhamad Azhar, “Metodologi Penelitian Hukum sebagai Instrumen Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer” *Jurnal Gema Keadilan* 7, No. 1, (2020).
- Santoso, A., & Wijayanti, A., “Eksistensi Dewan Pengupahan Dalam Proses Penetapan Upah Minimum” *Wijayakusuma Law Review* No. 2, (2020).
- Purnama, N. S., & Amelia, H., “Efektivitas Pengaturan Upah Tenaga Kerja Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja” *Pemuliaan Hukum* 4, No. 1, (2021).
- Hasaziduhu Moho, “Hakikat Upah Dalam Hubungan Ketenagakerjaan” *Jurnal Panah Keadilan* 1, No. 2, (2022).
- Ideta Eka Saputra, Bagus Sarnawa, “Peran Dinas Tenaga Kerja dalam Perlindungan terhadap Hak-Hak Atas Upah Pekerja” *Media of Law and Sharia* 3, No. 4, (2022).
- Sinta Lamria Yulianti Siagian, dkk, “Kedudukan Dewan Pengupahan Dalam Menentukan Upah Minimum Provinsi dan Kabupaten/Kota” *Lex Administratum* XII, No. 5, (2023).
- Lavenia, L., dkk, “Pengaruh Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), Upah Minimum, Pengangguran, Jumlah Penduduk dan Angka Melek Huruf Terhadap Kemiskinan di Provinsi Jawa Barat Tahun 2015-2021” *Jurnal Ekonomi Trisakti* 3, No. 1, (2023).

Suhartono, C. A. T., dkk, “Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Untuk Mendapatkan Upah Minimum Menurut Perppu Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja” *Jurnal Konstruksi Hukum* 5, No. 1, (2024).

Siregar, I. A., dkk, “Analisis Pengaruh Human Capital, Upah Minimum dan Angkatan Kerja Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Sektor Industri di Kota Gunung Sitoli Tahun 2018-2022” *Jurnal Riset Manajemen dan Ekonomi* 3, No. 1, (2025).

Skripsi/Disertasi

Defiana Indah Safitri, *Analisis Pengaruh Jumlah Tenaga Kerja, Laju Inflasi, dan Laju Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Upah Minimum Kota/Kabupaten di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2015-2019*, Skripsi, Universitas Tidar Magelang, 2022.

Erlina, Y., *Pengaturan Upah Pekerja Alih Daya Pasca Undang-Undang Cipta Kerja (Omnibus Law) Klaster Ketenagakerjaan berdasarkan Teori Pengupahan*, Disertasi, Universitas Kristen Indonesia, 2024.

Sumber Internet dan Wawancara

“Arti kata Tenaga Kerja – Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Online”, diakses 18 Maret 2025, <https://kbbi.web.id/tenaga%20kerja>.

Faqih Mansur Hidayat, “Pengusaha Jepara Keberatan UMSK, PHK Massal Jadi Ancaman” *MuriaNews*, 2025, <http://berita.murianews.com/faqih-mansur-hidayat/431241/pengusaha-jepara-keberatan-umsk-phk-massal-jadi-ancaman>, diakses 18 Maret 2025.

Firman Hidranto, “Meningkatkan Kesejahteraan Pekerja” *Indonesia.go.id Portal Informasi Indonesia*, 2023,

<https://indonesia.go.id/kategori/editorial/7801/meningkatkan-kesejahteraan-pekerja?lang=1?lang=1>, diakses 1 Juli 2025.

Lla Harahap, “KSPI Sebut PHK Massal Buruh Pabrik di Jateng Dampak UU Cipta Kerja, Pj Gubernur Minta Tak Dibesar-besarkan” *Merdeka.com*, 2024, <https://www.merdeka.com/peristiwa/kspi-sebut-phk-massal-buruh-pabrik-di-jateng-dampak-omnibus-law-pj-gubernur-minta-tak-dibesar-besarkan-155556-mvk.html?page=2>, diakses 18 Maret 2025.

Puspasari Setyaningrum, “Besaran UMP 2024 untuk 6 Provinsi di Pulau Jawa” *Kompas.com*, 2023, <https://regional.kompas.com/read/2023/11/22/211036278/besaran-ump-2024-untuk-6-provinsi-di-pulau-jawa>, diakses 19 Maret 2025.

Rohadisantoso, “Upah Minimum Sektoral: Apa Itu dan Mengapa Penting?” *HRMLabs*, 2024, <https://hrmlabs.com/id/upah-minimum-sektoral-apa-itu-dan-mengapa-penting/>, diakses 19 Februari 2025.

Tira Santia, “Upah Sektoral Hilang di UU Cipta Kerja, Buruh Protes Keras” *Liputan6*, 2020, <https://www.liputan6.com/bisnis/read/4379360/upah-sektoral-hilang-di-uu-cipta-kerja-buruh-protes-keras>, diakses 19 Februari 2025.

Yulida Medistiara, “Massa Buruh Gelar Demo Kamis 24 Oktober, Tuntut Kenaikan Gaji” *detikNews*, 2024, <https://news.detik.com/berita/d->

[7600678/massa-buruh-gelar-demo-kamis-24-oktober-tuntut-kenaikan-gaji](#), diakses 19 Maret 2025.

Adi Nugroho, Dinas Tenaga Kerja Provinsi Jawa Tengah, Divisi Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial, Wawancara, Kantor DISNAKER Provinsi Jawa Tengah, 23 Juni 2025.

Peraturan Perundang-undangan dan Putusan

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.

Konvensi ILO Nomor 131 tentang Penetapan Upah Minimum.

Konvensi ILO, *Global Wage Report*, 2013.

Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2013 tentang Upah Minimum.

Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 21 Tahun 2016 tentang Kebutuhan Hidup Layak.

Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 18 Tahun 2020.

Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan.

Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2023 tentang Pengupahan.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 168/PUU-XXI/2023.

Keputusan Gubernur Nomor 561/38 Tahun 2024 Gubernur Jawa Tengah.

Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 16 Tahun 2024 tentang Penetapan Upah Minimum Tahun 2025.

LAMPIRAN



PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
Jalan Pahlawan No. 16 Semarang, Kode Pos 50241 Telepon (024) 8311713
Faksimile (024) 8311711 Laman : <http://disnakertrans.jatengprov.go.id>
Pos el disnakertrans@jatengprov.go.id

SURAT – KETERANGAN

Nomor : 800/2571

Yang bertanda tangan dibawah ini :

N a m a : AHMAD AZIZ,SE, M.Si
N I P : 19680617 199803 1 007
Pangkat / Gol. : Pembina Utama Muda (IV/c)
Jabatan : Kepala Disnakertrans Provinsi Jawa Tengah
Unit Organisasi : Disnakertrans Provinsi Jawa Tengah

Dengan ini menerangkan bahwa :

N a m a : Ardissa Tazmine Hudaya
N I M : 11000121140570
Program Studi : Hukum Administrasi Negara

Telah melakukan Penelitian “ Urgensi Peningkatan Kesejahteraan Melalui Penetapan Upah Minimum Sektorial Dalam Sistem Hukum Ketenagakerjaan Jawa Tengah “di Dinas Tenaga kerja Dan Transmigrasi Provinsi Jawa Tengah.

Demikian untuk menjadi maklum dan atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Semarang, 29 Juli 2025

KEPALA DISNAKERTRANS
PROVINSI JAWA TENGAH

AHMAD AZIZ, SE, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19680617 199803 1 007